

**IMPLEMENTASI PERATURAN PERPUSTAKAANNASIONAL REPUBLIK  
INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG TRANSFORMASI  
PERPUSTAKAAN BERBASIS INKLUSI SOSIAL DI DINAS  
PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA PALEMBANG**

**JURNAL**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan  
Mencapai Derajat Sarjana Sosial (S. Sos)**



**DISUSUN OLEH :**

**NAMA : HENI RUSMANIA**

**NIM : 2111254P**

**PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI NEGARA**

**SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI  
SATYA NEGARA PALEMBANG  
TAHUN 2024**

IMPLEMENTASI PERATURAN KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG TRANSFORMASI PERPUSTAKAAN BERBASIS INKLUSI SOSIAL DI DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA PALEMBANG.

Oleh :

**Heni Rusmania**

Mahasiswa Program Studi Administrasi Negara S-1, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Satya Negara,  
[juwitakasuma@gmail.com](mailto:juwitakasuma@gmail.com)

---

**ABSTRACT**

*HENI RUSMANIA, NIM 21.11.254P. 2024 Impementation of National Regulation of the Republic of Indonesia Number 3 of 2023 concerning Library Transformation Based on sosial Inclusion in the palembang city library and archives Service. Departement of public adminisration at the satya negara palembang college of state administration (STIA)b. main supervisor (I) M. satarudin, S. Sos., M. Si and assistant supervisor (II) Mr. Saiton, S. Sos., M. Si.*

*Social inclusion-based libraries are libraries that provide services to increase the protential and insight of society (Sturges, 2004). Based on this, the national library of the republic of indonesia (National Library of the Republic of indonesia) has and important role in fostering the development of library services throughout indonesia into social inclusion-based libraries, and improving community welfare through the application of social inclusion-based library services. The aim of this research is to determinie the implementation of national regulation of the republic of indonesia number 3 of 2023 concerning library transformation based on social inclusion in the palembang city library and archives service.*

*The method used in this research is a qualitative research method with data collection through obervation,interviews,documentation,literature study.*

*Based on the resulth of research regarding the implementation of the national library regulation of the republic of indonesia number 3 of 2023 in the palembang city library and archives service. In its implementation it has been carried out well. Overall,each indicator of implemantion is commmunication , but there are still deficiencies in communication between employees because there are still employees from the palembang city library and archives service who do net ye understand the objectives of the social inclusion based library transformation program,human resouerces,disposition,bureaucratic structure and also from the indicators for implementing social inclusion-based library transformation,namely programs,government responsibility,patnerships and community participation, synergy teams, and financing for social inclusion – based library transformation.*

**Keyword : Implementation, Library Transformation, Sosial Inclusion.**

## ABSTRAK

**HENI RUSMANIA, NIM 21.11.254P**, 2024 Implementasi Peraturan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palembang. Jurusan Administrasi Negara pada Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Negara (STIA) Satya Negara Palembang. Pembimbing Utama (I) M. Sattarudin, S. Sos., M. Si dan Pembimbing Pendamping (II) Bapak Saiton, S. Sos., M. Si. Perpustakaan berbasis inklusi sosial merupakan perpustakaan yang menyediakan layanannya guna meningkatkan potensi dan wawasan pada masyarakat (Sturges, 2004). Berdasarkan hal tersebut Perpustakaan Nasional RI (Perpustakaan Nasional Republik Indonesia) mempunyai peran penting dalam membina pengembangan layanan perpustakaan-perpustakaan di seluruh Indonesia menjadi perpustakaan berbasis inklusi sosial, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengaplikasian layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi Peraturan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palembang.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi, studi pustaka.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Implementasi Peraturan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palembang. Dalam pelaksanaannya sudah terlaksana dengan baik. Secara keseluruhan masing-masing indikator dari implementasi yaitu komunikasi, namun masih terdapat kekurangan dalam komunikasi antar pegawai karena masih terdapat pegawai dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palembang yang belum Paham dari tujuan Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial sumber daya manusia, disposisi, struktur birokrasi dan juga dari indikator Pelaksanaan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial yaitu Program, tanggung jawab pemerintah, kemitraan dan peran serta masyarakat, tim sinergi, dan pembiayaan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial.

Kata kunci: *Implementasi, Transformasi Perpustakaan, Inklusi Sosial*

### 1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007, peran Perpustakaan sangat Penting di dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dalam peraturan perundangan secara tegas dijelaskan bahwa masyarakat memiliki hak dalam memperoleh layanan dan mendayagunakan fasilitas perpustakaan. Sesuai dengan yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 5 bahwa Perpustakaan Nasional RI merupakan lembaga

pemerintah yang memiliki kewajiban dalam membina perpustakaan di Indonesia, pasal tersebut berisi, bahwa; “Perpustakaan Nasional merupakan lembaga pemerintah non departemen (LPND) yang melaksanakan tugas pemerintahan dalam bidang perpustakaan yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan deposit, perpustakaan penelitian, perpustakaan pelestarian, dan pusat jejaring

perpustakaan, serta berkedudukan di ibukota negara”.

Undang-undang RI nomor 43 tahun 2007 menjelaskan tentang perpustakaan pasal 1 ayat 6 bahwa perpustakaan umum adalah perpustakaan yang diperuntukan bagi masyarakat luas sebagai guna sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, agama, dan status ekonomi. Hal itu sesuai dengan Manifesto Unesco NS (2008:26), tentang perpustakaan umum yang mengutamakan kelompok masyarakat yang harus diberi kesempatan untuk mengakses dan memanfaatkan perpustakaan umum tersebut.

Perpustakaan memiliki fungsi penting sebagai sarana edukasi, riset, data, informasi, rekreasi serta preservasi bagi masyarakat. Oleh sebab itu, perpustakaan dianggap memiliki peran penting sebagai agen pembangunan, perubahan, budaya serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebagai agen yang memiliki peran penting dalam masyarakat, perpustakaan harus dapat menyentuh masyarakat dari berbagai macam golongan, karena perpustakaan merupakan salah satu wadah penting untuk kepuasan informasi bagi masyarakat yang berasal dari berbagai golongan guna mengembangkan wawasan dan ilmu pengetahuan.

## 2. Landasan Teori Implementasi

Implementasi dalam Kamus Besar bahasa Indonesia diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Artinya yang dilaksanakan dan diterapkan adalah kurikulum yang telah dirancang/didesain untuk kemudian dijalankan sepenuhnya. Menurut para ahli, salusu (tahir, 2014) menyatakan, “ implementasi sebagai operasional dari berbagai aktivitas guna

mencapai suatu sasaran tertentu dan menyentuh seluruh jajaran manajemen mulai dari manajemen puncak sampai pada karyawan terbawah.

Sedangkan Horn (Tahir, 2014:55), “mengartikan implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh baik individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam kebijakan”.

### Unsur-Unsur Implementasi

Menurut Tachan (2006:26) menjelaskan tentang unsur-unsur dari implementasi kebijakan yang mutlak harus yang ada yaitu sebagai berikut :

Unsur pelaksana, pelaksana kebijakan merupakan pihak-pihak yang menjelaskan kebijakan terdiri dari penentuan tujuan dari sasaran organisasionasional, analisis, serta perumusan kebijakan dan strategi organisasi, pengambilan keputusan, perencanaan, penyusunan program perorganisasian, penggerakan manusia, pelaksanaan operasional, pengawasan serta penilaian.

Unsur program, program merupakan rencana yang bersifat kompratif yang sudah menggambarkan sumber daya yang akan yang digunakan dan terpadu dalam kesatuan. Program menggambarkan sasaran, kebijakan prosedur, metode standar bugget. Program-program yang bersifat operasional adalah program yang dapat dipahami dan dilaksanakan oleh diplementro.

### Fungsi Implementasi

Fungsi implementasi adalah Menurut Guntur setiawan (2009 : 39)

fungsi implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling memuaskan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana.

### **Tujuan Implementasi**

Tujuan implementasi adalah mencapai tujuan yang ingin dicapai dalam rencana atau kebijakan yang dirancang. Untuk menentukan kapasitas masyarakat untuk melaksanakan kebijakan atau rencana sebagaimana dimaksud seseorang harus mengimplementasikan ide untuk mencapai tujuan. Implementasi adalah suatu proses yang diterapkan tanpa ada batasan di berbagai bidang, mulai dari pendidikan, kemasyarakatan, politik, teknologi, kesehatan, informasi dan lain-lain. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, implementasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan dihubungkan oleh mekanisme untuk mencapai tujuan tertentu. Merujuk pada pengertian pelaksanaan, maka beberapa tujuan pelaksanaan adalah sebagai berikut.

Tujuan utama pelaksanaan adalah untuk mencapai suatu perencanaan yang matang, baik secara individu maupun secara tim.

### **Implementasi Peraturan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial**

Implementasi Peraturan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial merupakan acuan bagi: Perpustakaan Nasional, Perpustakaan

Provinsi, dan Perpustakaan Kabupaten/Kota, dan merupakan acuan bagi penyelenggara/pengelola dalam menyelenggarakan Program Kegiatan Transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial.

Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial merupakan suatu pendekatan pelayanan perpustakaan yang berkomitmen meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat pengguna perpustakaan.

Perpustakaan berbasis inklusi sosial merupakan perpustakaan yang memfasilitasi masyarakat dalam mengembang potensinya dengan melihat keragaman budaya, kamauan untuk menerima perubahan, serta menawarkan kesempatan berusaha melindungi dan memperjuangkan budaya dan Hak Azasi Manusia (HAM).

### **Kerangka Berfikir**

Menurut Sugiyono (2013:60), kerangka berpikir merupakan sebuah pemahaman yang melandasi pemahaman-pemahaman yang lainnya, menjadi pemahaman yang paling mendasar serta sebagai pondasi bagi setiap pemikiran atau dari suatu proses keseluruhan dari penelitian yang akan dilakukan.

Menurut Uma Sekaran dalam Sugiyono, (2019:95) mengemukakan bahwa kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka berpikir dalam suatu penelitian perlu dikemukakan apabila dalam penelitian tersebut berkenaan dua variabel atau lebih. Apabila penelitian hanya membahas sebuah variabel atau lebih secara mandiri, maka yang dilakukan peneliti

disamping mengemukakan deskripsi teoritis untuk masing-masing variabel, juga argumentasi terhadap variasi besaran variabel yang diteliti Sapto Haryoko dalam Sugiyono, (2019:95).

### 3. PROSEDUR PENELITIAN

Metode penelitian ini adalah menurut Sugiono (2013:2), metode pada dasarnya merupakan cara untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan. Menurut Darmadi (2013:153), metode penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu rasional, empiris, dan sistematis.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan penelitian kualitatif, menurut Gunawan (2015:80), penelitian kualitatif menekankan pada analisis proses berfikir secara induktif yang berkaitan dengan dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dan senantiasa menggunakan logika ilmiah.

#### Definisi Konsep

Definisi konsep adalah dalam penelitian ini memiliki 2 konsep yaitu Implementasi Kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan, Transformasi Perpustakaan adalah suatu perubahan dalam unsur perpustakaan, diantaranya unsur koleksi, pengolahan, penyimpanan dan pemakaian.

#### Definisi Operasional

Definisi Operasional adalah salah satu instrumen dari riset karena merupakan salah satu tahapan dalam proses pengumpulan data. Definisi dari operasional menjadikan konsep yang masih bersifat abstrak menjadi operasional yang memudahkan pengukuran variabel tersebut. Sebuah definisi operasional juga bisa dijadikan sebagai batasan pengertian yang dijadikan pedoman untuk melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan penelitian.

#### Informan Penelitian

Informan penelitian ialah menunjukkan disetiap orang yang dapat menyediakan informasi rinci dan pendapat berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya mengenai info atau dilema tertentu yang berhubungan dengan objek penelitian Wirawan,(2012:205). Adapun pihak-pihak yang dijadikan responden dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palembang
- 2) Pustakawan
- 3) Penyuluh Perpustakaan
- 4) Tenaga Teknis

#### Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan

1. Observasi
2. Wawancara
3. Dokumentasi
4. Studi pustaka.

#### Teknik Analisa Data

Teknik analisa data merupakan metode yang digunakan untuk

mengumpulkan data yang telah dikumpulkan dan diklarifikasikan sesuai dengan tujuan peneliti. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif.

Menurut Miles dan Huberman (1992:16), analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi. Mengenai ketiga alur tersebut secara lebih lengkap sebagai berikut.

- 1) Reduksi data (Pengumpulan data)
- 2) Penyajian Data
- 3) Penarikan Kesimpulan

#### **4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **1. Implementasi**

Dalam penulisan ini penulis menggunakan model Implementasi yang dikembangkan oleh George Edwards III sebagai alat analisis, yaitu:

###### **a. Komunikasi**

Komunikasi adalah suatu kegiatan manusia untuk menyampaikan apa yang menjadi pemikiran dan perasaannya, harapan atau pengalamannya kepada orang lain. Pada umumnya dalam sebuah organisasi baik organisasi pemerintah maupun organisasi swasta, komunikasi memiliki fungsi sebagai alat untuk menjalin dan mengembangkan hubungan yang ada, sehingga terjalin sebuah jaringan kerja yang dapat membangun kepercayaan antara individu atau kelompok agar tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi tersebut tercapai dengan baik.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Herly Kurniawan, S. Sos., M. AP selaku kepala Dinas Perpustakaan dan

Kearsipan Kota Palembang mengungkapkan bahwa komunikasi antar pegawai maupun dengan pihak-pihak terkait sudah berjalan dengan baik sebagaimana mestinya karena tanpa adanya komunikasi maka setiap kebijakan dari pemerintah tidak dapat terlaksana serta terealisasi dengan baik sebagaimana pada sasaran yang telah diharapkan. (wawancara tanggal 29 April 2024).

###### **b. Sumber Daya**

Sumber Daya Manusia adalah faktor pertama dan utama dalam mendukung keberhasilan dalam implementasi untuk menjalankan sebuah kebijakan, karena manusia adalah faktor penggerak laju implementasi kebijakan. Sesuai dengan Agustino (2008:142) bahwa dalam tahap tertentu dari sebuah proses implementasi menurut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang ditetapkan secara politik. Tetapi Ketika kompetensi dan kapabilitas dari sumber daya itu nihil, maka kinerja kebijakan publik akan sulit untuk diharapkan.

Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Amriansah, SE., M.M selaku Pustakawan Ahli Muda diperoleh keterangan Dalam pelaksanaan Implementasi Peraturan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palembang implementor sarana dan prasarana sangat berpengaruh dalam sumberdaya yang ada di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palembang. Sosialisasi pada masyarakat harus dilakukan secara rutin guna

terlaksana Kesejahteraan Masyarakat.  
(wawancara tanggal 26 April 2024)

### c. Disposisi

Sikap dan perilaku menjadi salah satu kunci keberhasilan implementasi kebijakan, kejujuran, tanggung jawab, komitmen merupakan perilaku yang perlu perhatian pelaksana kebijakan. Sikap dan perilaku adalah karakter manusia yang mudah terpengaruh oleh lingkungan dimana manusia itu berada. Jika lingkungan pelaku pelaksana kebijakan didominasi orang-orang dengan mengedepankan kejujuran, komitmen dan tanggung jawab, maka sikap dan perilaku di lingkungan tersebut akan mengarahkan pelaksana kebijakan pada arah yang benar. Sikap dan perilaku positif juga perlu mendapat reward atau sebaliknya *punishment* bagi yang lalai sehingga menimbulkan spirit yang dapat meningkatkan efektifitas pelaksanaan guna mewujudkan kebijakan.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Herly Kurniawan, S. Sos., M. AP selaku kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palembang diperoleh keterangan bahwa Terwujudnya masyarakat yang sejahtera melalui adanya Program transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palembang berjalan dengan semestinya yang kita harapkan untuk kedepannya. (wawancara tanggal 29 April 2024).

### d. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi secara kelembagaan sangat penting dalam proses implementasi kebijakan. Struktur birokrasi pelaksana kebijakan yang mengatur susunan tugas dan hierarki organisasi birokrasi yang berpedoman pada Standar Operasional Prosedur dan

mekanisme. Dalam proses Implementasi kebijakan Walikota menciptakan lingkungan yang bersih dan nyaman, dibuat dan disusun sebagai teknis atau sistem pelaksanaan kebijakan yang terencana.

Penulis juga melakukan wawancaranya dengan Ibu Elfa Suryani, SE selaku Pustakawan Ahli Muda diperoleh keterangan bahwa Dengan sedikit keterbatasan dalam Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial ini banyak kesulitan yang dihadapi selama program ini berjalan untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera melalui Perpustakaan.

## 2. Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial

Setelah dilakukan penelitian dan wawancara dengan beberapa informan mengenai Implementasi Peraturan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palembang maka berikut dilakukan pembahasan dan hasil penelitian.

### a) Program Kerja Kegiatan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial

Membuat Program Kerja Kegiatan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial yang akan dilaksanakan di buat oleh *Person in Charge (PIC)* atau penanggung Jawab yang telah di tunjuk oleh Pimpinan dari Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca.

Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Amriansah, SE., M.M selaku Pustakawan Ahli Muda diperoleh keterangan

Pelaksanaan Kegiatan Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palembang juga melibatkan masyarakat dimana mereka melakukan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palembang.

**b) Tanggung Jawab Pemerintah terhadap Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palembang**

Tanggung Jawab Pemerintah terhadap Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial Pemerintah ikut serta mendukung program kegiatan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial yang di laksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palembang dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga mampu meningkatkan inovasi, kreativitas masyarakat serta kesenjangan akses informasi.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Herly Kurniawan, S. Sos., M. AP selaku kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palembang diperoleh keterangan.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan melakukan pendekatan kepada pemerintah yang terkait untuk mendapatkan dukungan dalam pelaksanaan kegiatan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial yang di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palembang.

**c) Tim Sinergi Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palembang**

Tim Sinergi Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial dibutuhkan karena untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan Pogram Kegiatan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Herly Kurniawan, S. Sos., M. AP selaku kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palembang diperoleh keterangan. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan membuat Tim Sinergi yang di Tanda Tangan Oleh Walikota Palembang mendapatkan dukungan dalam pelaksanaan kegiatan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial yang di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palembang.

**d) Mitra dan Masyarakat dapat berperan dalam Pelaksanaan Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial**

Dalam Pelaksanaan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial pemerintah membangun kemitraan dengan berbagai pihak untuk memperoleh dukungan yang berkelanjutan dalam pelaksanaan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial dan untuk membangun ekosistem yang mendukung Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial, Peran serta Masyarakat dalam Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial mendukung Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial yang berkelanjutan berpartisipasi aktif dalam kegiatan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial.

Pendapat lain juga melakukan wawancaranya dengan Ibu Elfa

Suryani, SE selaku Pustakawan Ahli Muda diperoleh keterangan bahwa, Dalam pelaksanaan program kegiatan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial membutuhkan dukungan mitra dan masyarakat untuk berperan aktif dalam pelaksanaan kegiatan program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palembang.

## 5. SIMPULAN DAN SARAN

### Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan Pembahasan, yang telah dilaksanakan oleh penulis maka dapat disimpulkan yaitu : Implementasi Peraturan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palembang. Dalam pelaksanaannya sudah terlaksana dengan baik. Secara keseluruhan masing-masing indikator dari implementasi yaitu komunikasi, namun masih terdapat kekurangan dalam komunikasi antar pegawai karena masih terdapat pegawai dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palembang yang belum Pahami dari tujuan Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial sumber daya manusia, disposisi, struktur birokrasi dan juga dari indikator Pelaksanaan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial yaitu Program, tanggung jawab pemerintah, kemitraan dan peran serta masyarakat, tim sinergi, dan pembiayaan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial.

### Saran

Hendaknya kegiatan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial ini dapat terus berjalan sebagai mana mestinya sesuai dengan Peraturan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial ini Karena sangat penting bagi masyarakat terutama dalam tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan untuk pegawai dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dapat diberikan sosialisasi dan arahan terkait program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, dan sosialisasi melalui media cetak, media online dan media elektronik dengan program pengenalan terkait program kegiatan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial agar dapat lebih dikenal oleh masyarakat luas.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Beni. 2001 *Metode Penelitian*. Bandung. Pustaka Setia.
- Agustino, 2006.144. *Dasar-dasar kebijakan Publik. Cetakan ke-6*. Bandung. Alfabeta
- Alhumami, Amich 2018. *Kebijakan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial dalam mendukung pencapaian SDGs*. Kementerian PPN/Bappenas. Direktur Pendidikan Tinggi, Iptek, dan Kebudayaan.

Basuki, Sulistyono 2017. *Konsep Pengembangan Perpustakaan Umum menuju Perpustakaan Digital. Jakarta: Perpustakaan Nasional*

Herlina 2009 *Manajemen Perpustakaan (Pendekatan Teori dan Praktek)*. Palembang: Grafika Telindo Pers

Makalah pelatihan *strategi pengembangan perpustakaan yang disampaikan dalam pelatihan SPP di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kulon Progo Tahun 2016*

Perpustakaan Nasional. 2019 *Pedoman Umum Literasi Untuk Kesejahteraan melalui Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial*. Jakarta 2021.